

Rencana Aksi Tahun 2023



DPMPTSP KAB. PURWAKARTA
Jl. Veteran No. 139 Purwakarta

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi	3
Maksud dan Tujuan	7
Landasan Hukum	8
BAB II. RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA	6
Ikhtisar perjanjian Kinerja Tahun 2023	9
Rencana Aksi Tahun 2023	16
BAB III.PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

1) LATAR BELAKANG

Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Aksi ini memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan terkecil pada unit organisasi Pemerintah Daerah. Rencana Aksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat, sehingga kualitas penyusunan Rencana Aksi akan menentukan kualitas pelayanan pada masyarakat dalam kaitan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses penyusunannya dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Aksi dengan mengumpulkan pengolahan

data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu, dan Renstra yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Kerja Tahunan, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Rencana Kerja Tahunan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah;
- c. Penyusunan Rencana Aksi bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya

satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Rencana Aksi dengan dokumen RKPD dan Renstra merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Aksi merupakan penjabaran dana dan hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra dan RKPD. Rencana Aksi merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, dasar penyusunan RKA-DPA dan RAPBD.

2) TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

a. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi

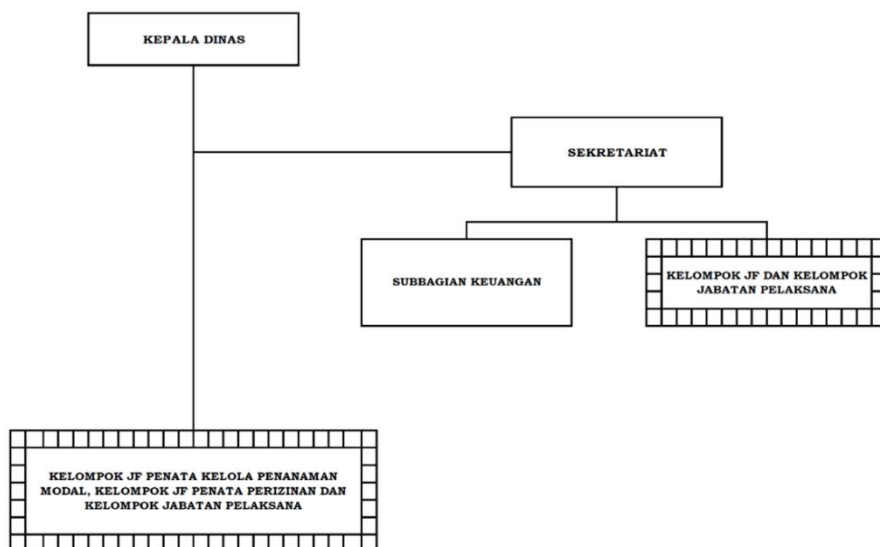
1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

c. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA



Sumber : DPMPTSP 2022

d. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai DMPTSP sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 83 orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2022

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	%
1.	Pegawai Negeri Sipil		
	- Jabatan Struktural	3	3,61
	- Jabatan Fungsional	16	19,28
	- Jabatan Fungsional Pelaksana	24	28,92
2.	Non Pegawai Negeri Sipil		
	- Pegawai Tidak Tetap	5	6,03
	- Tenaga Harian Lepas	35	42,16
	JUMLAH	83	100%

Sumber : DPMPTSP 2022

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	Pasca Sarjana	9	10,85
2.	Sarjana	34	40,97
3.	Diploma IV	2	2,40
4.	Diploma III	2	2,40
5.	SMA	35	42,17
6.	SMP	-	-
7.	SD	1	1,21
JUMLAH		83	100%

Sumber : DPMPTSP 2022

Tabel 1.3
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan tahun 2022

NO	GOLONGAN	a	b	c	d	e	JML	%
1.	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-
2.	Golongan II	-	1	-	11	-	12	27,91
3.	Golongan III	6	4	1	13	-	24	55,82
4.	Golongan IV	7	-	-	-	-	7	16,27
JUMLAH							43	100%

Sumber : DPMPTSP 2022

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2022

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	%
1.	Laki-laki	45	54,22
2.	Perempuan	38	45,78
JUMLAH		83	100%

Sumber : DPMPTSP 2022

3). MAKSUD DAN TUJUAN

- a) Maksud dari Rencana Aksi Tahun 2023 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
- b) Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana aksi ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

4). LANDASAN HUKUM

- a) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan ;
- d) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

1) IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja terhadap target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta berdasarkan tujuan/sasaran strategis jangka menengah serta dengan telah disahkannya Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Maka Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

Sasaran Pertama,

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN.

Indikator : Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN. Dengan target kinerja pada Tahun 2023 adalah sebesar 75 Triliun.

Sasaran Kedua,

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal.

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan target kinerja pada Tahun 2023 adalah sebesar 82,50.

Dari indikator kinerja utama tersebut diperjanjikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta sebagai pemberi mandat dalam bentuk Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	75 Triliun
2.	Mingkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 210.000.000	APBD
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 190.000.000	APBD
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 220.000.000	APBD
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 406.890.600	DAK NF
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 226.818.200	APBD
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahacn Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.766.736.753	Dana Perimbangan, APBD

Untuk dapat merealisasikan capaian kinerja sesuai dengan target pada rencana kinerja tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, maka terdapat 6 (enam) Program yang mendukung sasaran strategis dan sasaran penunjang/ kinerja penunjang.

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Ket.
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	18	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	18	01	2.01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	
2	18	01	2.01	06	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	
2	18	01	2.01	07	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	
2	18	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	18	01	2.02	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	
2	18	01	2.02	05	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
2	18	01	2.02	07	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	3 Laporan	

							Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
2	18	01	2.03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
2	18	01	2.03	05	01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		
2	18	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2	18	01	2.05	02	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90 stel		
2	18	01	2.05	09	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90 Orang		
2	18	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2	18	01	2.06	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Jenis		
2	18	01	2.06	03	01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0 Paket 32 Jenis		
2	18	01	2.06	04	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Paket		
2	18	01	2.06	05	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18 Jenis		
2	18	01	2.06	06	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Jenis		
2	18	01	2.06	08	01	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		

2	18	01	2.06	09	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan / 1 tahun	
2	18	01	2.06	10	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang tertata	10 jenis dokumen	
2	18	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	18	01	2.07	05	01	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	
2	18	01	2.07	06	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	
2	18	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	18	01	2.08	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	
2	18	01	2.08	02	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
2	18	01	2.08	04	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Orang yang Menerima Honorarium dan Tunjangan Non ASN	0 Laporan 1 Laporan 43 Orang/bulan	
2	18	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	18	01	2.09	01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	
2	18	01	2.09	05	01	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit	
2	18	01	2.09	06	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Jenis	
2	18	01	2.09	09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	3 Unit	

							Dipelihara/Direh abilitasi		
2	18	01	2.09	10	1	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	1 Paket	
2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
2	18	02	2.01			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	02	2.01	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Pembuatan Naskah Akademik) Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	
2	18	02	2.02			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
2	18	02	2.02	02	01	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Minat Penanaman Modal	1 Dokumen	
2	18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
2	18	03	2.01			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	03	2.01	01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen	
2	18	03	2,01	02	01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
2	18	04	2.01			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
2	18	04	2.01	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	864 Pelaku Usaha 90 Poin	

							Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		
2	18	04	2.01	02	01	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100 Kegiatan Usaha	
2	18	04	2.01	03	01	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 Orang	
2	18	04	2.01	04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	5 Kegiatan Usaha	
2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
2	18	05	2.01			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	05	2.01	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	80 Kegiatan Usaha	
2	18	05	2.01	02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 Pelaku Usaha	
2	18	05	2.01	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan	80 Kegiatan Usaha	

							Sinkronisasi Pengawasan		
2	18	06					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
2	18	06	2.01				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
2	18	06	2.01	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Aplikasi 500 Dokumen 2 Dokumen	

2) RENCANA AKSI TAHUN 2023

Secara rinci Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.:

TABEL RENCANA AKSI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Langkah Aksi	Target Pelaksanaan Per Triwulan				Output	Outcome
											I	II	III	IV		
III.1						Tujuan : Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif										
III.1.2						Sasaran : 1. Meningkatkan Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan informasi Penanaman Modal	Laju Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN (Persentase)	5%	806.890.600		1,25%	1,25%	1,25%	1,25%		
						Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	6,25			1,56	1,56	1,56	1,56			
2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			210.000.000							
2	18	02	2,01			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			110.000.000							
2	18	02	2,01	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Pembuatan Naskah Akademik)	1 Dokumen	110.000.000	Penyusunan Dokumen Naskah Akademik (NA) Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				√	Jasa Konsultasi dalam penyusunan dokumen NA Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya Perda yang Memberikan fasilitasi/insentif dan kemudahan bagi Investor dalam emitraan
2	18	02	2,02			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			100.000.000							
2	18	02	2,02	02	01	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Minat Penanaman Modal	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen mengenai Peluang / Potensi Penanaman Modal				√	Jasa Konsultasi Pembuatan Peta Potensi Penanaman Modal di Kabupaten Purwakarta	Tersedianya alat/sarana berupa peta atau dokumen yang memberikan gambaran kepada investor mengenai peluang / potensi investasi di Kabupaten Purwakarta

2	18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		190.000.000								
2	18	03	2,01			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		190.000.000								
2	18	03	2,01	01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	1 Dokumen	80.000.000	Penyelenggaraan Investment Award (Anvesta)	√				Jasa penyelenggaraan Acara Anugerah Investasi Award	Tersedianya penghargaan dari Pemda kepada Investor yang memberikan peningkatan investasi
2	18	03	2,01	02	01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.000.000	Penyelenggaraan pada event promosi investasi		√	√		Jasa penyelenggaraan Acara pameran investasi Penanaman Modal	Tersedianya Informasi investasi penanaman modal dalam kegiatan pameran.
										Pembukaan Teras Madukara Kec. Maniis			√		Jasa Event Organizer dalam rangka Peresmian Gerai Pelayanan Publik Teras Madukara	Terlaksananya Peresmian Gerai Pelayanan Publik Teras Madukara oleh Bupati Purwakarta, sekaligus menjadi sarana sosialisasi Teras Madukara kepada masyarakat
2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		406.890.600								
2	18	05	2,01			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		406.890.600								
2	18	05	2,01	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	80 Kegiatan Usaha	112.890.600	Penyelenggaraan Forum Penyelesaian Masalah Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha	√				Jasa penyelenggaraan Acara Forum Penyelesaian Masalah Yang	Meningkatnya pemahaman dan penyelesaian permasalahan Pelaku Usaha mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal pasca UU Cipta Kerja dan meningkatnya capaian realisasi penanaman modal

2	18	05	2,01	02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 Pelaku Usaha	228.000.000	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			√		Jasa penyelenggaraan Acara Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)	Meningkatnya pemahaman Pelaku Usaha mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal pasca UU Cipta Kerja dan meningkatnya capaian realisasi penanaman modal
										Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			√		Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)	Meningkatnya pemahaman Pelaku Usaha mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal pasca UU Cipta Kerja dan meningkatnya capaian realisasi penanaman modal
2	18	05	2,01	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	80 Kegiatan Usaha	66.000.000	Inspeksi Lapangan	√	√	√	√	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan	Terlaksananya kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
										Evaluasi Pengawasan Penanaman Modal	√	√	√	√	Laporan Evaluasi Penanaman Modal	Tersedianya data evaluasi penanaman modal

V.1						Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel										
V.1.1						Sasaran : 2. Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat A	446.818.200		A	A	A	A		
							Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5		82,5	82,5	82,5	82,5			
2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			220.000.000							
2	18	04	2,01			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			220.000.000							
2	18	04	2,01	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	864 Pelaku Usaha	100.000.000	Penyelenggaraan pelayanan perizinan di Tempat / Gempungan	√	√	√	√	Laporan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha Mikro	Terlaksananya Formalisasi Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro
2	18	04	2,01	02	01	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100 Kegiatan Usaha	80.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan dan non perizinan	√	√	√	√	Pemeriksaan Lapangan dan Rapat Tim Teknis terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Norma, standar, Prosedur dan Kriteria
2	18	04	2,01	03	01	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 Orang	30.000.000	Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	√	√	√	√	Survey Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai Bahan Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2	18	04	2,01	04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	5 Kegiatan Usaha	10.000.000	Koodinasi kemitraan usaha UMKM baik dengan perbankan atau perusahaan besar			√		Laporan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Teridentifikasi nya fasilitas/ insentif bagi UMKM ataupun Perusahaan Besar

2	18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		226.818.200								
2	18	06	2,01			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		226.818.200								
2	18	06	2,01	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Aplikasi 500 Dokumen	226.818.200	Pengalihan penyimpanan berkas dari Arsip/Berkas hardcopy ke media server (softcopy)			√		Jasa Konsultansi layanan alih media arsip	Tersimpannya arsip dokumen 500 IMB tahun 2017 dari hardcopy ke softcopy di media Server
										Pembuatan Iklan Radio dalam penyajian data dan Sistem Informasi Perizinan			√		Jasa Konsultansi Pembuatan iklan radio	Tersosialisasikan nya informasi perizinan dan non perizinan
										Pengembangan sistem Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan Online			√		Jasa Konsultansi berorientasi bidang telematika	Tersedianya Aplikasi yang Memberikan Kemudahan Pelayanan perizinan dan non perizinan
										Pengembangan dan Pemeliharaan Website DPMPPTSP dan Website MPP Bale Madukara	√	√	√	√	Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	Terpeliharanya Sistem Informasi Pelayanan dan Media Sosial

BAB III PENUTUP

Rencana Aksi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Rencana Aksi disusun dengan mempedomani Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang mengacu kepada RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 ini berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023 sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan.

Rencana Aksi ini secara umum menguraikan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub-kegiatan serta indikator dan target kinerja. Maka dengan mempedomani Rencana Kerja Tahunan ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD, diharapkan tugas fungsi dinas dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja

prangkat daerah untuk mendukung pencapaian visi misi Bupati Purwakarta. Yang terpenting bahwa Rencana Aksi ini akan dapat tercapai dengan komitmen dari seluruh unsur pimpinan dan staf yang disertai pengabdian dan loyalitas yang tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat.

Demikianlah dokumen Rencana Aksi untuk periode tahun 2023 ini yang disusun sebagai bagian dari pelaksanaan perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 03 Januari 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.,
NIP. 19790605 200501 1 013